

4. Faktor-faktor yang mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia antara lain: (1) stabilitas politik yang baik, (2) iklim usaha yang kondusif, (3) tenaga kerja yang murah, (4) lokasi yang strategis, dan (5) kemudahan dalam melakukan transaksi internasional.

Dokumen



RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

- I. PERSIAPAN KTT ASEAN IV
- II. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN
 - A. Masalah Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
 - 1. Seminar Perdagangan Bebas ASEAN
 - 2. Pernyataan KADIN ASEAN Tentang AFTA
 - 3. Masalah Pelaksanaan AFTA
 - 4. Konsep AFTA
 - B. Kerja Sama Industri, Mineral dan Energi
 - 1. Pertemuan AFCM
 - 2. Pertemuan Pusat Informasi Ketenaga Listrik ASEAN
 - C. Kerja Sama Pangan, Pertanian dan Kehutanan
 - Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN
- III. KERJA SAMA NON-EKONOMI
 - Kerja Sama Kebudayaan dan Informasi
 - 1. Sidang Umum CAJ
 - 2. Konferensi Guru ASEAN
 - 3. Pertemuan Pejabat Tinggi Agama ASEAN
 - 4. Pertemuan MABIM
- IV. KERJA SAMA NON-PEMERINTAHAN (NGO)
 - A. Kerja Sama Kesehatan
 - 1. Kongres Ahli Anestesi ASEAN
 - 2. Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN IV
 - B. Kerja Sama Palang Merah ASEAN
 - C. Kerja Sama Lingkungan Hidup
 - 1. Masalah Kebakaran Hutan
 - 2. Seminar Lingkungan Hidup
- V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG
 - A. Hubungan ASEAN-Vietnam
 - 1. Keinginan Vietnam Menjadi Anggota ASEAN
 - 2. Reaksi dan Komentar
 - B. Hubungan ASEAN-Asia Pasifik
 - Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
- VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH KAMBOJA
 - Pertemuan SNC

I. PERSIAPAN KTT ASEAN IV

Siaran pers Pemerintah Singapura tanggal 21 Nopember 1991 mengatakan bahwa: (1) KTT ASEAN IV bulan Januari 1992 perlu mengambil prakarsa baru untuk mempererat kerja sama ekonomi di antara anggotanya; (2) ASEAN harus memperluas dan mengintensifkan kerjasamanya agar tetap relevan dengan perubahan-perubahan lingkungan internasional yang sangat cepat; (3) KTT perlu meninjau kembali perkembangan-perkembangan besar di bidang ekonomi dan politik internasional yang terjadi sejak KTT Manila 1987 serta mempertimbangkan implikasinya terhadap wilayah Asia Tenggara (*Kompas*, 22-11-1991).

Dalam pertemuan Pengusaha ASEAN-Jepang yang berlangsung di Singapura tanggal 19 Nopember 1991, Menteri Negara Senior Pendidikan Singapura, Tay Eng Soon, mengatakan bahwa: (1) KTT ASEAN IV perlu mempertimbangkan sebuah paket langkah-langkah yang tegas untuk membantu perkembangan perdagangan ASEAN seperti: (a) usul pembentukan perdagangan bebas ASEAN (AFTA-ASEAN Free Trade Area); (b) pengurangan secara progresif bea masuk yang menyeluruh intra ASEAN; (c) penghapusan hambatan non-tarif, seperti kuota, kontrol ekspor dan subsidi; (2) KTT akan diawali dengan pertemuan SOM bidang ekonomi dan para Dirjen (*Kompas*, 22-11-1991).

II. KERJA SAMA EKONOMI

A. MASALAH PERDAGANGAN BEBAS

1. Seminar Perdagangan Bebas ASEAN

Seminar bertema Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 28 Nopember 1991, diselenggarakan oleh Institut Manajemen Praseptya Mulya dihadiri antara lain oleh Menteri Perdagangan Arifin Siregar, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto, Sekjen Deperteman Perindustrian, Ichadi Elias, Dirjen Seknas ASEAN Agus Tarmidzi, Prof. Dr. Suhadi Mangkusuwondo, Prof. Dr. Moch. Sadli, Sofjan Wanandi, Anggota DPR Marzuki Darusman.

Prof. Dr. Suhadi Mangkusuwondo mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) ASEAN sangat perlu untuk menarik dana dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas, sebab selama dasawarsa 1990 dunia mengalami kelangkaan dana; (2) rencana ME menyatukan pasarnya ternyata mampu menarik modal besar memasuki daerah itu, karena potensi pasarnya besar, dan ASEAN dapat menarik pelajaran dari keberhasilan itu dengan mengambil langkah serupa; (3) perdagangan bebas ASEAN tidak hanya mampu

menarik modal asing yang diperebutkan, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi semua negara anggota ASEAN; (4) manfaat perdagangan bebas ASEAN antara lain: (a) terjadinya 50% penurunan tarif untuk beberapa komoditi yang diperdagangkan sesama ASEAN akan sangat bermanfaat; (b) kegiatan ekspor dan impor intra-ASEAN akan meningkat tajam dan kenaikannya akan terbagi merata; (c) sebagian kenaikan impor merupakan penciptaan impor baru dan sebagian lainnya berupa pengalihan impor dari negara lain sesama ASEAN; (d) kenaikan ekspor sama sekali tidak akan mengurangi jumlah ekspor ke luar ASEAN; (e) sukses perdagangan ASEAN akan semakin mengokohkan hubungan dari keterikatan yang menguntungkan ASEAN; (5) antusias ke arah pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN sangat rendah, terutama masyarakat Indonesia sama sekali tidak tertarik dengan rencana itu sebab: (a) ASEAN lebih disibukkan oleh masalah Kamboja; (b) dunia usaha Indonesia sangat sibuk memikirkan kesulitan ekonomi dalam negeri; (c) sikap pengusaha yang skeptis akan kemungkinan terbentuknya perdagangan bebas ASEAN, karena ASEAN memang belum siap memperdagangkan secara bebas komoditi dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak; (6) jika dalam suatu area perdagangan bebas satu negara diperbolehkan untuk tidak ikut serta adalah kurang irasional atau tidak masuk akal (*Kompas*, 29-11-1991); (7) bila ASEAN tidak mengambil keputusan yang berani dalam KTT-ASEAN IV nanti, tarikan ekonomi dari luar yang semakin kuat akan memperlemah kerja sama regional ini; (8) kehadiran forum APEC yang lebih efektif sekarang dan penandatanganan Bilateral Trade and Investment Framework Agreement antara Singapura dan AS, Muangthai dan AS serta Filipina dan AS telah membuka pintu baru bagi ASEAN untuk secara sendiri-sendiri mengadakan ikatan baru dengan pihak luar (*Suara Karya*, 29-11-1991).

Pada saat yang sama, Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan bahwa: (1) meskipun perhatian ASEAN pada masalah ekonomi baru mulai, tetapi telah mampu menunjukkan sisi-sisi cerah di bidang perdagangan; (2) jika di ASEAN dibentuk perdagangan bebas, negara anggotanya harus berani menanggung konsekuensinya, terutama Indonesia harus siap: (a) menerima investasi dengan persyaratan yang sangat mudah; (b) menerima impor berbagai barang dari sesama negara anggota ASEAN; (c) proteksionisme yang lebih ringan (*Kompas*, 29-11-1991).

Menteri Perindustrian Ir. Hartarto mengatakan bahwa: (1) rencana pembentukan perdagangan bebas hanya akan memperdagangkan produk-produk industri; (2) tidak semua produk industri diperdagangkan secara bebas seperti barang modal, industri kecil dan produk

yang berkaitan dengan kesehatan. Sementara itu, produk industri yang belum mampu bersaing dapat dicekualikan; (3) negara anggota ASEAN yang belum memiliki kemampuan menerima perdagangan bebas boleh memilih tidak ikut kawasan perdagangan bebas ASEAN; (4) komoditi Indonesia yang paling dapat diandalkan adalah tekstil, elektronik, produk kimia, sumber daya alam olahan dan beberapa produk industri kecil; (5) pembatasan perdagangan bebas komoditi itu perlu dilakukan untuk melindungi industri Indonesia (*Kompas*, 29-11-1991).

Sementara itu, Sofjan Wanandi mengatakan bahwa: (1) Indonesia belum memiliki daya saing karena itu tidak dapat berbuat banyak dalam perdagangan bebas; (2) jika perdagangan bebas dilaksanakan, Indonesia harus benar-benar siap. Untuk itu beberapa deregulasi harus segera dilakukan dan jangan hanya mempersoalkan masalah moneter yang hanya memberatkan pengusaha (*Kompas*, 29-11-1991).

Sedangkan Rudy Pesik mengatakan bahwa: (1) dilihat dari sisi Indonesia, perdagangan bebas itu dapat mematikan industri dalam negeri; (2) pengusaha Indonesia belum siap memasuki era perdagangan bebas, kecuali untuk komoditi-komoditi tertentu (*Kompas*, 29-11-1991).

Sejken Departemen Perindustrian Ichadi Elias mengatakan bahwa: (1) jika perdagangan bebas dilaksanakan dapat mematikan industri Indonesia, karena itu perlu memilah-milah komoditi yang perlu diperdagangkan; (2) secara historis perdagangan intra ASEAN tidak dapat dikatakan sukses; (3) meskipun dikeluarkan peraturan penurunan tarif 50% dari tarif umumnya, tetapi pelaksanaannya tidak berhasil. Di satu pihak perdagangan yang berdasarkan penurunan tarif hanya mencapai US\$289 juta, di lain pihak perdagangan di luar penenaan tarif mencapai US\$19 milyar; (4) kegagalan perdagangan intra ASEAN disebabkan oleh unsur birokrasi yang sangat menghambat, tidak konsistennya setiap anggota ASEAN untuk memberikan kemudahan tarif dan penenaan perubahan tarif yang tidak menentu; (5) perdagangan bebas tidak akan mampu berkembang karena produk RI kurang diminati di Malaysia demikian pula sebaliknya; (6) data yang menunjukkan perdagangan intra ASEAN tidak berkembang adalah ekspor intra ASEAN pada tahun 1970 hanya memiliki porsi sebesar 19,8% dari total ekspor US\$6,154 juta, kemudian tahun 1980, ekspor intra ASEAN hanya 16,7% dari total US\$66,534 juta dan pada tahun 1989 hanya 17,4% dari total US\$119,536 juta (*Kompas*, 29-11-1991).

Marzuki Darusman mengatakan bahwa: (1) gagasan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ber-

bagai hubungan bilateral di bidang ekonomi menunjukkan perlunya segera dicarikan dan diciptakan struktur kerja sama baru ASEAN; (2) dibandingkan dengan gagasan baru tentang keamanan, dari segi jumlah dan kejelasan konsep ekonomi lebih memperoleh tanggapan dalam proses pendalaman integrasi ASEAN (*Kompas*, 29-11-1991).

Sedangkan Dewi Fortuna mengatakan bahwa: (1) dipandang dari jauh ASEAN sangat indah, tetapi kerja sama ekonominya hampir tidak berarti; (2) Indonesia yang seringkali dianggap sebagai batu penjurus ASEAN tidak memperlancar kerja sama ekonomi ASEAN. Padahal ketika Kamboja jatuh pada tahun 1976 kerja sama ekonomi dinilai penting untuk mempertahankan keléstarian ASEAN; (3) sudah seharusnya kerja sama ekonomi ASEAN merupakan bagian dari perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang (*Suara Karya*, 29-11-1991).

Dr. Djisman Simandjuntak dari CSIS mengatakan bahwa: (1) Singapura dan Muangthai akan mendominasi perdagangan intra ASEAN jika rencana perdagangan bebas diberlakukan dan Indonesia akan sulit bersaing dengan mereka karena: (a) basis industri kedua negara itu selangkah lebih maju dibandingkan dengan Indonesia; (b) perencanaan makro industri nasional Indonesia kurang memperhatikan perubahan eksternal yang terjadi selama ini, bahkan kebijakan makro ekonomi kadang-kadang kurang konsisten; (c) keterbatasan sejumlah infrastruktur, seperti listrik dan transportasi serta kurangnya investasi di bidang sumber daya manusia; (2) lahirnya kesepakatan negara anggota ASEAN dengan pihak luar menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN tidak ingin terintegrasi (*Media Indonesia*, 29-11-1991).

2. Pernyataan KADIN ASEAN Tentang AFTA

Siaran pers KADIN ASEAN dalam Harian *The Nation* Bangkok tanggal 2 Desember 1991 mengatakan bahwa KADIN ASEAN: (1) mendukung terciptanya kawasan perdagangan bebas ASEAN secara bertahap untuk mengurangi tarif impor produk-produk yang diperdagangkan di ASEAN selama 15 tahun; (2) menghendaki agar konsep perdagangan bebas diterapkan untuk jasa-jasa dan barang modal; (3) menyetujui jika untuk sementara waktu hasil-hasil pertanian dicekualikan; (4) mendukung pembentukan perdagangan bebas melalui metode *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang diusulkan Indonesia (*Media Indonesia*, 3-12-1991).

3. Masalah Pelaksanaan AFTA

Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 6 Desember 1991 bahwa: (1) ASEAN perlu segera menyepakati pelaksanaan ASEAN Free Trade Area (AFTA), agar negara-negara anggotanya tidak bergabung dalam wadah lain; (2) KTT ASEAN mendatang diharapkan dapat menyetujui usul para Menteri mengenai masalah AFTA; (3) AFTA perlu segera dilaksanakan sejalan dengan akan berfungsinya Pasar Tunggal Eropa (PTE) 1993, sementara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah sepakat membentuk kawasan perdagangan bebas serupa; (4) pembentukan AFTA diharapkan akan memacu peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN yang selama ini berjalan lambat; (5) mengingat pelaksanaan AFTA diberlakukan secara bertahap, maka yang perlu dibicarakan adalah bukan kehadiran AFTA tetapi jenis produk yang dimasukkan ke dalamnya; (6) pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN akan menguntungkan konsumen, karena para produsen yang selama ini menikmati perlindungan pemerintah terpaksa meningkatkan produktivitas mereka; (7) masuknya barang produksi satu negara ke negara lain akan menguntungkan konsumen karena mereka memiliki berbagai pilihan; (8) kemiripan struktur ekonomi negara-negara anggota ASEAN seperti masih bertumpu pada sektor pertanian, menuju proses industrialisasi, jenis produk yang serupa dan banyaknya proteksi merupakan hambatan untuk mewujudkan perdagangan bebas ASEAN selama ini; (9) dalam beberapa tahun terakhir struktur ekonomi ASEAN semakin kokoh dan sektornya semakin luas, termasuk program diversifikasi produk dan manufakturnya telah berkembang sehingga membuka peluang kerja sama; (10) ASEAN harus mawas diri menghadapi perkembangan perdagangan global yang penuh proteksi dan munculnya blok perdagangan di berbagai belahan dunia (*Suara Karya*, 7-12-1991).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto mengatakan bahwa: (1) Indonesia telah berani bersaing dan membuka pasarnya untuk barang impor produk manufaktur; (2) untuk kepentingan konsumen dalam negeri produk manufaktur Indonesia jangan terus diberi perlindungan, karena akan mengakibatkan kurang berani mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya saingnya; (3) kesediaan Indonesia memasuki AFTA tercermin dari berbagai kebijaksanaan deregulasi yang dikeluarkan, sebab deregulasi itu ikut membuka pasar Indonesia bagi negara-negara ASEAN dan di luar ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 7-12-1991).

4. Konsep AFTA

Deputi PM Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan kepada AFP tanggal 15 Desember 1991 bahwa: (1) KTT ASEAN IV diharapkan akan menerima usulan AFTA tanpa perubahan yang berarti; (2) KTT akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan berbagai modifikasi teknis dari rencana yang disusun para Menteri Ekonomi bulan Oktober di Kuala Lumpur, Oktober 1991; (3) KTT akan mempertimbangkan Vietnam sebagai mitra dialog, tetapi masa depan kerja sama dengan Hanoi itu sangat tergantung dari sikap Vietnam terhadap perdagangan bebas; (4) konsep AFTA merupakan usulan Muangthai; (5) ASEAN mengalami banyak kemajuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di Asia Tenggara; (6) situasi sekarang berat bagi ASEAN untuk memajukan kerja sama ekonomi AS dan Eropa sedang bergerak, dan ASEAN perlu meningkatkan posisinya; (7) keputusan membentuk Pasar Tunggal Eropa secara intrinsik tidak buruk bagi ASEAN, tetapi kesempatan pasar bagi penanam modal akan membuat modal lari dari Asia; (8) para pejabat ASEAN sedang bekerja menyusun perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani dalam KTT IV; (9) pembentukan AFTA merupakan keputusan yang bagus, apalagi tidak diikutsertakannya bidang pertanian dan jasa sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran; (10) untuk merendahkan bea masuk di wilayah-wilayah yang diperkirakan lemah, sebuah negara diperbolehkan tidak ikut serta dalam peraturan perjanjian AFTA; (11) Filipina dan Indonesia khususnya berhati-hati untuk menerima perjanjian itu; (12) KTT akan membicarakan usul Malaysia mengenai East Asian Economic Caucus (EAEC) yang sudah mengalami banyak perubahan dari usul pertamanya, karena menghadapi tantangan dari AS; (13) ASEAN mendukung pembentukan sebuah badan tidak resmi yang akan membicarakan agenda atau jadwal pertemuan mengenai EAEC (*Kompas*, 16-12-1991).

B. Kerja Sama Industri, Mineral dan Energi

1. Pertemuan AFCM

Pertemuan ke-7 Federasi Produsen Semen ASEAN (AFCM) berlangsung di Yogyakarta tanggal 21-23 Nopember 1991 untuk membahas persediaan semen, program peningkatan dan perluasan industri semen ASEAN.

Dirjen Industri Kimia Dasar Wardiyasa mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) para produsen semen di Indonesia merasa terpuak oleh kebijaksanaan pemerintah tahun 1990 yang membatasi

ekspor semen, karena harus membatalkan kontrak yang telah ditandatangani dengan para importir dari berbagai negara sehingga menurunkan kredibilitas mereka. Di samping itu, para pengelola jasa angkutan laut juga menuntut ganti rugi dari pembatalan kontrak angkutan semen; (2) dalam 10 tahun terakhir ini Indonesia telah menjadi eksportir semen terbesar ASEAN; (3) dengan produksi 17 juta ton per tahun, Indonesia mampu menembus pasar di 20 negara, terutama Bangladesh yang merupakan importir semen Indonesia terbesar; (4) pembatasan ekspor semen cukup rasional, karena semakin meningkatnya konsumsi semen di dalam negeri; (5) pembatasan ekspor semen dilakukan karena perbandingan antara penawaran dan permintaan saat ini masih timpang, meskipun telah dilakukan optimalisasi produk dari semua pabrik semen; (6) pembatasan ekspor semen akan diberlakukan sampai kebutuhan dalam negeri benar-benar terpenuhi (*Bisnis Indonesia*, 27-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) kurangnya produksi semen di masing-masing negara anggota ASEAN akan tetap berlanjut sampai tahun 1992; (2) melalui program peningkatan dan perluasan industri semen, pada tahun 1993 akan terjadi surplus semen; (3) sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dan saling pengertian antar sesama anggota AFCM yang mengalami kesulitan produksi dan pemasaran; (4) sepakat membebaskan harga semen untuk memenuhi kebutuhan semen dalam negeri; (5) sepakat membentuk komite kerja sama teknik dan pemasaran serta komisi pengembangan sumber daya manusia yang diketuai oleh Masri Saridan, Direktur PT. Semen Tonasa Indonesia; (6) sepakat memperluas pasar ke berbagai negara, seperti Vietnam, Myanmar dan Kamboja; (7) komite bertugas melaksanakan berbagai simposium, pertemuan dan lokakarya serta menjalin kerja sama dengan asosiasi semen seluruh dunia (*Bisnis Indonesia*, 27-11-1991).

2. Pertemuan Pusat Informasi Ketenaga Listrikian

Pertemuan Pusat Informasi Ketenaga Listrikian (*Electric Power Information Centre* atau EPIC) ASEAN ke-7 berlangsung di Bali Tanggal 5-8 Nopember 1991, dihadiri 23 delegasi dan 9 peninjau dari negara anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam, serta 40 perutusan dari badan pengelola ketenaga listrikian ASEAN, untuk membahas penciptaan informasi ketenaga listrikian, aspek finansial, perencanaan dan pengembangan tenaga listrik (*Antara*, 6-11-1991).

Dirut PLN, Ermansyah Jamin mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) pertemuan bertujuan menciptakan informasi ketenaga listrikian; (2) EPIC meru-

pakan salah satu dari sembilan proyek kerja sama yang ditetapkan dalam pertemuan para pimpinan perusahaan ketenaga listrikian ASEAN tahun 1981 di Jakarta; (3) di kawasan Pulau Batam sedang dipersiapkan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga diesel (PLTD) yang berkapasitas 4,5 megawatt. Kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan proyek itu dapat diekspor ke Singapura dan Malaysia. PLN akan segera mengadakan inventarisasi dan reorganisasi sistem jaringan listrik yang dapat langsung dipasok ke industri-industri yang membutuhkannya untuk mempercepat pengaturan sistem interkoneksi jaringan tenaga listrik di Pulau Batam; (4) PLN sebagai BUMN penghasil tenaga listrik terbesar di kawasan ASEAN sekarang ini potensi pelanggannya 12 juta dan dalam tahun 2000 akan mencapai 25 juta pelanggan (*Antara*, 6-11-1991).

C. KERJA SAMA PANGAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN

1. Pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN

Pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-13 berlangsung di Muangthai tanggal 31 Oktober-2 Nopember 1991 untuk membahas upaya peningkatan pertanian dan perdagangan hasil pertanian antara negara anggota ASEAN.

Ketua delegasi Muangthai, Wakil Menteri Pertanian Ajva Taulananda, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN perlu mempererat kerja sama ekonominya untuk menghadapi perubahan pola pertanian yang begitu cepat dan meningkatkan perdagangan hasil pertanian; (2) ASEAN perlu membentuk kelompok khusus yang menyusun kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perubahan pola pertanian baik regional maupun internasional; (3) kelompok khusus ini akan mengkaji cara meningkatkan perdagangan hasil pertanian antar negara anggota ASEAN dan mendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil hutan dan pertanian; (4) Muangthai sangat memperhatikan dampak perkembangan sektor pertanian terhadap lingkungan di kawasan ASEAN (*Merdeka*, 4-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) sepakat untuk bekerjasama mempromosikan 12 produk pertanian utama dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Langkah ini merupakan formulasi yang baik untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian dan menghadapi proteksionisme perdagangan hasil pertanian; (2) mendukung himbauan Muangthai agar ASEAN menanggapi tumbuhnya kesadaran lingkungan dan memperbaiki

mutu produk guna mempertahankan pangsa pasar di negara industri (*Merdeka*, 4-11-1991); (3) sepakat melaksanakan sebuah rencana aksi bersama untuk melestarikan hutan tropis di ASEAN untuk mempertahankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan; (4) mempersiapkan diri untuk menghadiri konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan yang akan berlangsung di Brasil, Juni 1992; (5) melihat pentingnya sikap bersama untuk mempertahankan diri dari tuduhan negara-negara maju atas kebijakan ASEAN mengenai hutan tropis; (6) ASEAN akan menjelaskan kepada dunia bahwa industri hutannya diawasi ketat untuk menjamin pertumbuhan dan lingkungan; (7) sepakat memperbanyak riset dan latihan mengenai masalah hutan tropis karena sangat diperlukan ASEAN; (8) sepakat mengenai pertemuan ke-14 dilangsungkan di Indonesia tahun 1992 (*Angkatan Bersenjata*, 4-11-1991).

Sesuai pertemuan, Menteri Pertanian Muangthai Anat Arbbabhirom, mengatakan: (1) rencana aksi bersama ASEAN akan mencakup pemberian informasi kepada dunia bahwa ASEAN sangat memperhatikan masalah penebangan hutan; (2) Indonesia yang memiliki banyak hutan berjanji akan mengawasi penebangan hutan secara ketat; (3) ASEAN akan mengirim wakil-wakilnya untuk memantau kampanye menentang penebangan hutan tropis; (4) pengelolaan hutan tropis, riset, penebangan, pemrosesan kayu, pemasaran dan pembangunan industri hutan akan dilaksanakan sesuai dengan aksi bersama serta kerja sama ASEAN dan negara-negara maju (*Angkatan Bersenjata*, 4-11-1991).

III. KERJA SAMA NON EKONOMI

- KERJA SAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Sidang Umum CAJ

Sidang Umum Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) ke-9 dengan tema "Garis Aksi Tindakan Wartawan ASEAN 1990" berlangsung di Bangkok tanggal 4-7 Nopember 1991, dihadiri 200 orang peserta dari ASEAN dan peninjau dari berbagai negara di Asia, Amerika Utara dan Australia untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi wartawan ASEAN dalam menjalankan profesinya (*Antara*, 5-11-1991).

PM Muangthai, Anand Panyarachun, mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) apapun sistem demokrasi dalam bentuknya yang aktual harus menghasilkan pemerintah yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan pers; (2) menurut penelitian terdapat 300 bentuk demokrasi, karena

itu membangun demokrasi tidak dapat menjiplak negeri lain; (3) pemerintahan mayoritas hendaknya menghargai sepenuhnya hak-hak minoritas. Artinya setiap orang atau kelompok mempunyai hak dan kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya; (4) demokrasi hanya berfungsi jika rakyat berpartisipasi; (5) partisipasi rakyat harus digalakkan dengan menjamin bahwa setiap orang berhak untuk didengarkan dan berpartisipasi; (6) kebebasan pers dan kebebasan organisasi kemasyarakatan sangat berperanan agar demokrasi berfungsi, karena akhirnya rakyat yang harus mengontrol pemerintah; (7) kebebasan pers agar disertai dengan kredibilitas dan integritas, antara lain dengan meningkatkan kesamaan dan mutu serta menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dan mengurangi sensasionalisme; (8) pers perlu memperbesar kerja sama antar media ASEAN dan mewujudkan itikad baik yang mengatasi tapal batas nasional dan tapal batas lainnya; (9) Muangthai akan tetap melanjutkan berlakunya ekonomi pasar, ekonomi terbuka, deregulasi dan kompetisi; (10) sulit bagi negara-negara kecil untuk bersaing di pasar internasional dengan negara-negara yang lebih kuat yang semakin diperkuat dengan kemampuan kompetitifnya melalui aliansi-aliansi perdagangan bebas yang baru; (11) menurut konstitusi Muangthai yang baru, calon PM harus seseorang yang terpilih melalui pemilu atau oleh parlemen tanpa melalui pemilu (*Kompas*, 5-11-1991).

Ketua delegasi Muangthai, Manich Sooksomchetna, mengatakan bahwa: (1) pengawasan pers di Muangthai dimasa lalu sangat ketat, sebab suatu pembicaraan harus mendapat ijin dari pemerintah, termasuk pengawasan untuk mendapatkan ijin penerbitan pers; (2) di Muangthai sejak tahun 1976 dilakukan pengawasan dan larangan terhadap suatu pemberitaan; (3) sejak tahun 1990 pers di negaranya mulai merasakan kebebasan dan bebas dari pengawasan pemerintah; (4) kebebasan pers di negaranya sekarang lebih longgar dibandingkan dengan pers di berbagai negara Asia lainnya (*Antara*, 5-11-1991).

Ketua delegasi Filipina Julius F. Fortuna, mengatakan bahwa: (1) keadaan ekonomi negaranya yang sangat berat belakangan ini menyebabkan penghasilan wartawan menjadi sangat rendah dibandingkan dengan profesi lainnya; (2) persaingan yang tidak sehat antara para penerbit di Filipina saat ini mengakibatkan timbulnya wartawan amplop; (3) sejak tahun 1986 tercatat 22 orang wartawan Filipina meninggal dalam melaksanakan tugasnya, namun disanggah pemerintah.

Sekjen *Malaysian National Union of Journalist* (NUJM), Don Ec S Seng, mengatakan bahwa: (1) pers Malaysia dalam beberapa tahun lalu sangat terpe-

ngaruh oleh sikap multi ras, tetapi kini telah berhasil dibina dalam kerukunan antar ras, khususnya dalam penerbitan yang beraneka ragam bahasa; (2) kondisi ekonomi wartawan di Malaysia cukup baik dibandingkan dengan para pekerja industri maupun profesi lainnya di Malaysia; (3) meningkatnya perkembangan ekonomi di Malaysia telah mendorong NUJM mengusahakan suatu status profesi yang lebih terjamin (Antara, 5-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain mendesak: (1) pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab; (2) pemerintah negara-negara Asia Tenggara agar menghapuskan segala peraturan yang menghambat dan menolak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, tetapi hendaknya mendukung dan melindungi media massa untuk melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya; (3) penguasa agar menciptakan suatu lingkungan yang dapat mengembangkan profesionalisme jurnalistik termasuk pertumbuhan industri media massa; (4) para wartawan ASEAN agar mengembangkan liputan berita-berita dengan perspektif ASEAN, termasuk berita-berita dari negara tetangganya dengan memperhatikan isu-isu yang sensitif; (5) wartawan ASEAN agar memperluas terciptanya suatu keharmonisan dan solidaritas di antara pemerintah-pemerintah ASEAN dan rakyatnya. Selanjutnya mereka: (1) menyambut dan mendukung pandangan PM Muangthai tentang kebebasan pers yang merupakan suatu termometer dari demokrasi, sebab tanpa kebebasan dasar tersebut demokrasi tidak dapat berkembang; (2) menyampaikan rasa simpati kepada 300 wartawan Filipina yang menjadi korban letusan gunung Pinatubo dan mencatat permintaan bantuan mereka; (3) mengucapkan terima kasih kepada berbagai organisasi dan lembaga-lembaga internasional yang selama ini memberikan bantuan pendidikan dan peningkatan ketrampilan wartawan ASEAN di berbagai tempat seperti, Jepang, Kanada, Jerman dan lain-lainnya; (4) menetapkan berlakunya kartu pers ASEAN yang dikeluarkan oleh CAJ sejak tahun 1991; (5) menetapkan Malaysia sebagai penyelenggara sidang para dewan direktur CAJ tahun 1992 dan menyelenggarakan Sidang Umum CAJ X tahun 1993 di Indonesia; (6) memilih Bandhit Rajavatanadhanin dari Muangthai sebagai Presiden CAJ untuk masa bakti 1991-1993 (Suara Pembaruan, 8-11-1991).

2. Konferensi Guru ASEAN

Konferensi Guru ASEAN (ASEAN Teacher Convention atau ATC) ke-13 dengan tema "Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan" berlangsung di Bali tanggal 28-30 Nopember 1991, dihadiri 500

orang peserta dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Muangthai, Singapura dan Brunei Darussalam untuk membahas masalah globalisasi dan dampaknya dalam pembangunan (Antara, 21-11-1991).

Menteri Pendidikan Fuad Hassan mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) perubahan-perubahan yang terjadi akibat globalisasi, khususnya di bidang ilmu dan teknologi, di samping berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga harus diwaspadai kemungkinan dampak negatifnya bagi perubahan sosial dan budaya; (2) membahas dampak globalisasi di bidang pembangunan dan pendidikan semata adalah tidak cukup. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap yang tepat di kalangan anak didik dan generasi muda agar mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat proses globalisasi itu; (3) globalisasi yang tidak dapat dihindari dapat menciptakan masa depan yang tidak dapat dipastikan (Kompas, 30-11-1991).

Delegasi Indonesia Lukman Ali, mengatakan bahwa pemyarakatan karya sastra belum tertangani secara baik, karena karya sastra belum menjangkau masyarakat luas menumbuhkan sikap positif pembaca terhadap nilai-nilai insani menghadapi kehidupan manusia (Kompas, 30-11-1991).

Prof. Dr. Sadi Hutomo mengatakan bahwa di Indonesia kurang perhatian terhadap masalah mobilitas dalam buku-buku telaah sastra. Hal ini mengakibatkan pada pelajaran sastra yang bersifat historis, sehingga kedudukan pengarang dan karyanya kadang-kadang disalah tafsirkan. Buku "Socrapati" saduran Abdool Mociis misalnya, karena sebagai karya yang terbit tahun 1950, maka kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat kurang berarti dibandingkan dengan Salah Asochan (1928) (Kompas, 2-12-1991).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mempererat solidaritas dan kerja sama serta meningkatkan profesionalisme dan status sosial mereka; (2) membentuk kelompok kerja yang bertugas merancang pembentukan organisasi guru ASEAN, termasuk struktur, tugas, sistem, fungsi dan prosedurnya; (3) menyarankan kepada organisasi guru sedunia agar tidak memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuan organisasi guru; (4) menyelenggarakan konvensi ACT XIV di Filipina tahun 1992 dengan mengundang beberapa negara di luar ASEAN (Media Indonesia, 2-12-1991).

3. Pertemuan Pejabat Tinggi Agama ASEAN

Pertemuan para Pejabat Tinggi Agama ASEAN berlangsung di Bandung tanggal 11-13 Nopember

1991, dihadiri 30 peserta dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk membahas program kerja dan merumuskan bahan-bahan yang akan disahkan oleh ketiga Menteri Agama dalam Musyawarah Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (MABIM) ke-3 di Bandung tanggal 14 Nopember 1991 (*Pelita*, 12-11-1991).

Seusai membuka pertemuan, Sekjen Departemen Agama, dr.H. Tarmizi Taher mengatakan kepada pers bahwa: (1) MABIM ke-3 akan memutuskan penyelarasan kajian strategi pembinaan akidah islamiyah, penyelarasan pengawasan barang gunaan dan makanan orang Islam dan penyelarasan rukyah dan takwim Islam; (2) dalam SOM tiap negara akan menyampaikan kertas kerja masing-masing; (3) Brunei akan menyampaikan makalah tentang Pertukaran Penerbitan, Malaysia mengenai Pusat Kajian Islam dan Indonesia membahas Pembentukan Pesantren Bersama dan Kerja Sama Seni Budaya Islam, sedangkan Singapura tentang Rencana Pengadaan Rumah Pemotongan Hewan (*Pelita*, 12-11-1991); (4) dalam MABIM ke-3 Filipina dan Muangthai akan hadir sebagai peninjau (*Pelita*, 14-11-1991).

Pada saat yang sama, Setia Usaha Menteri Hal Ehwal Uagama Brunei, Dato Paduka Abdul Saman bin Kahar, mengatakan bahwa: (1) perkembangan Islam di Indonesia maju pesat baik dalam bidang ekonomi maupun stabilitas poliitik; (2) umat Islam di Indonesia telah lebih maju dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain, karena telah mendirikan bank Islam; (3) umat Islam yang berada di Timur harus sungguh-sungguh menerapkan ukhuwah Islamiyah, agar negara-negara Barat melihat bahwa umat Islam bersatu; (4) Pusat Penterjemahan Asia Tenggara, khususnya penterjemahan bahan-bahan keagamaan perlu didirikan, karena akan bermanfaat bagi umat Islam di Asia Tenggara. Kerja sama penterjemahan itu dilakukan secara kolektif dan dikerjakan oleh umat Islam di empat negara, baik menyangkut teknis maupun tenaga kerja; (5) pertukaran penerbitan dapat meningkatkan kualitas umat Islam dan dapat membimbing pengertian keagamaan ke arah yang benar; (6) usul mendirikan pesantren bersama di daerah perbatasan Kalimantan sangat baik, karena dapat melahirkan ulama-ulama dan kader-kader Islam yang tangguh, sehingga kehidupan umat semakin mantap; (7) peningkatan kualitas institut pengajian atau institut agama di masing-masing negara perlu mendapat perhatian yang serius; (8) kehancuran komunis Blok Timur perlu mendapat perhatian serius umat Islam, karena menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang dipercaya dan kemungkinan Islam dapat mengisinya jika umat Islam bersatu; (9) persatuan umat Islam Asia Tenggara dapat dijadikan contoh dan dapat menjadi

panutan negara-negara lain (*Antara*, 14-11-1991); (10) keharmonisan sosial menjadi syarat utama terbinanya suatu negara dan hal itu hanya dapat terwujud bila masalah kehidupan masyarakat telah diselesaikan dan diatur dengan baik; (11) sebagai agama yang selaras dengan naluri dan kehidupan manusia, Islam telah memberi tuntunan bagaimana membina keharmonisan sosial (*Kompas*, 14-11-1991).

Presiden Majelis Uagama Islam Singapura, H. Zainul Abidin Rasheed, mengatakan bahwa: (1) pertemuan MABIM sebaiknya membahas masalah narkoba, obat terlarang dan cangkok organ ginjal; (2) umat Islam perlu memainkan peranan aktif, agar tidak hanya orang-orang sekuler yang dapat berperanan di kehidupan politik, tetapi juga umat Islam dapat melakukannya (*Pelita*, 12-11-1991); (3) ide pengadaan rumah pemotongan hewan didasarkan pada keinginan mengoptimalkan ekonomi umat dan menjamin daging memenuhi syareat agama, namun hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut (*Kompas*, 14-11-1991).

4. Pertemuan MABIM

Pertemuan tidak resmi para Menteri Agama tiga negara ASEAN (MABIM) ke-3 berlangsung di Bandung tanggal 14 Nopember 1991, juga dihadiri oleh delegasi Muangthai, Filipina dan Singapura sebagai peninjau, untuk membahas laporan pelaksanaan keputusan pertemuan MABIM ke-2 di Kuala Lumpur dan 5 hal pokok tentang kerja sama pertukaran penerbitan, kerja sama seni budaya Islam, Pusat Kajian Islam, pembangunan pesantren bersama dan pengadaan rumah pemotongan hewan bersama (*Suara Pembaruan*, 14-11-1991).

Menteri Agama H. Munawir Sjadzali mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) pertemuan dimaksudkan untuk mempersatukan umat Islam ASEAN, karena persatuan dan kesamaan pendapat umat Islam di kawasan ini akan semakin memperkokoh perjuangan untuk mewujudkan perdamaian dunia; (2) peranan negara-negara ASEAN cukup memberikan andil untuk mewujudkan perdamaian dunia sebab jumlah umat Islam di kawasan ini sangat banyak; (3) pembangunan yang mendapat dukungan positif masyarakat Islam harus terus menerus memperhatikan agama dan budaya masyarakatnya; (4) perlu diusahakan suatu iklim yang mendukung usaha peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Muslim; (5) keberhasilan modernisasi umat Islam hendaknya tidak membuat berpuas diri. Umat Islam harus berjuang demi kebangkitan Islam (*Pelita*, 15-11-1991).

Sementara itu Menteri Hal Ehwal Uagama Brunei Darussalam, H.M Zein bin H. Serudin mengatakan: (1) pertemuan MABIM tidak mencampuri masalah politik, tetapi membahas masalah sosial kemasyarakatan dan kemaslahatan bersama; (2) di dalam sesama Muslim harus ditumbuhkan semangat bersama agar tercipta kerukunan dan kedamaian bersama memperbaiki tingkat kedudukan umat Islam di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan; (3) Islam sebagai cara hidup harus dilaksanakan dengan baik. Di samping itu Islam harus menyelesaikan setiap permasalahan sesuai dengan dasar etika Islam, sebab hanya dengan cara itu usaha menciptakan perdamaian dunia akan lebih terbuka (*Pelita*, 15-11-1991).

Menteri Hal Ehwal Uagama Malaysia Dato Abang H. Abubakar bin Dato Bandar Abang H. Mustapha, mengatakan bahwa: (1) Islam sedang memasuki era baru; (2) perlu diwujudkan semangat kesatuan dan persatuan sesama masyarakat muslim di negara anggota MABIM (*Pelita*, 15-11-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) sepakat untuk menentukan awal Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama; (2) merencanakan pembangunan pesantren bersama tiga negara yang lokasinya telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (*Merdeka*, 15-11-1991).

IV. KERJA SAMA NON PEMERINTAHAN (NGO)

A. KERJA SAMA KESEHATAN

1. Konggres Ahli Anestesi ASEAN

Konggres Ahli Anestesi ASEAN ke-VII berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 6-11-1991, dihadiri 350 peserta dari ASEAN dan negara-negara lainnya untuk membahas perawatan kaum lanjut usia (*Antara*, 7-11-1991).

2. Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-IV

Pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN ke-IV berlangsung di Jakarta tanggal 4-5 Desember 1991, dihadiri para Menteri Kesehatan ASEAN kecuali Filipina dan Muangthai yang diwakili serta 18 pejabat staf senior bidang kesehatan untuk membahas masalah bahaya penyakit *Aquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan kesehatan lingkungan (*Kompas*, 5-12-1991).

Wakil Presiden Sudharmono mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) untuk mewujudkan

kerja sama kefarmasian perlu pemantapan pelaksanaan komunikasi kesehatan melalui pertukaran informasi; (2) pertukaran informasi penting karena masalah kesehatan yang dihadapi ASEAN tidak banyak berbeda, seperti kondisi geografis, pola makanan dan tingkat pendidikan; (3) melalui peningkatan komunikasi itu dapat ditingkatkan pertukaran informasi kesehatan yang memudahkan tukar pengalaman dan saling belajar di kalangan negara anggota ASEAN; (4) masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat strategis, karena tingkat kesehatan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat produktivitas bangsa dan negara serta mempunyai dampak jauh ke depan; (5) pertemuan agar menghasilkan keputusan nyata dan realistik serta memberi manfaat bagi kemajuan dunia kesehatan di negara anggota ASEAN (*Kompas*, 5-12-1991).

Hasil pertemuan antara lain sepakat untuk: (1) membentuk jaringan informasi tentang penyakit AIDS dan masalah lingkungan; (2) mengajukan permasalahan AIDS pada KTT ASEAN yang akan datang (*Suara Karya*, 5-12-1991).

Seusai menutup pertemuan, Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH mengatakan kepada pers bahwa: (1) kini AIDS telah semakin meluas dan membunuk, sementara mutu lingkungan juga makin menurun akibat cepatnya industrialisasi di negara anggota ASEAN, yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan; (2) menuntut WHO, hingga Juni 1991 sekitar 10 juta orang dewasa dan 1 juta anak di seluruh dunia telah tertular virus AIDS. Enam juta di antaranya terdapat di Afrika dan lebih 1 juta di Asia Selatan dan Tenggara; (3) di ASEAN jumlah penderita AIDS terbanyak di Muangthai sekitar 4.000 ribu orang dan Malaysia 2.500 orang. Meskipun relatif kecil tetapi bahaya peningkatannya semakin tampak, oleh karena itu perlu segera dilakukan penanggulangannya sedini mungkin; (4) sampai sejauh ini AIDS belum ditemukan obatnya dan 75% infeksi virus ini ditularkan melalui hubungan seksual; (5) untuk mengantisipasi AIDS, Indonesia mulai 1992 akan memperluas daerah waspada AIDS dari enam propinsi menjadi 10 propinsi. Langkah ini diambil untuk menekan jumlah penderita maupun yang sudah terinfeksi virus AIDS yang jumlahnya mencapai 40 orang; (6) semakin meluasnya penyakit AIDS memungkinkan meningkatnya jumlah penderita TBC, karena kuman-kuman TBC menjadi aktif. Sehingga peningkatan kasus infeksi virus AIDS seiring dengan peningkatan kasus infeksi virus AIDS (*Suara Karya*, 5-12-1991).

B. Kerja Sama Palang Merah ASEAN

Pertemuan para Sekjen Palang Merah negara anggota ASEAN berlangsung di Bali tanggal 1 Nopember 1991, dihadiri delegasi-delegasi Indonesia, Malaysia, Muangthai, Singapura dan Filipina, untuk membahas penggalan dana bagi kepentingan organisasi (Antara, 1-11-1991).

Sekjen PMI Soetikno Loektidisastro mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 1 Nopember 1991 bahwa: (1) pertemuan Sekjen Palang Merah ASEAN diprakarsai oleh Liga Parang Merah Internasional; (2) pertemuan ini untuk mengetahui lebih jauh cara negara anggota ASEAN mengumpulkan dana kemanusiaan; (3) Indonesia menawarkan kepada anggota ASEAN lainnya tentang cara menggali dana melalui penyelenggaraan pameran lukisan, karena telah menunjukkan hasil yang baik; (4) penggalan dana yang dilakukan oleh PMI selama ini tidak dipaksa dan tidak ada paksaan untuk memberikan sumbangan; (5) cara meminta sumbangan dengan menghentikan kendaraan di jalan-jalan telah lama dihentikan (Antara, 1-11-1991).

C. KERJA SAMA LINGKUNGAN HIDUP

1. Masalah Kebakaran Hutan

Sesuai bertemu dengan Menteri kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim, Menteri Lingkungan Singapura, Ahmad Mattar, mengatakan kepada pers di Singapura tanggal 29 Nopember 1991 bahwa: (1) ASEAN akan mengkaji segala upaya untuk mencegah terbakarnya hutan seperti yang telah terjadi di Kalimantan dan Sumatera akhir-akhir ini; (2) pertemuan kelompok kerja ASEAN yang akan dilakukan bulan Januari 1992 direncanakan membahas penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan cara-cara perlindungan terhadap dampak lingkungan; (3) ASEAN akan mengkaji kemungkinan pembentukan proyek regional yang akan mempekerjakan konsultan asing untuk mengkaji penyebab dan pencegahan terbakarnya hutan; (4) kebakaran yang melanda Kalimantan dan Sumatera telah menimbulkan dampak lingkungan di Singapura dan Malaysia (Media Indonesia, 30-11-1991).

Pada saat yang sama, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan bahwa: (1) kebakaran di Kalimantan sudah mulai berkurang dengan mulai datangnya musim hujan; (2) kebakaran di Kalimantan paling sedikit menghancurkan 50.000 hektar hutan (Media Indonesia, 30-11-1991).

2. Seminar Lingkungan Hidup

Direktur *Private Investment and Trade Opportunities* (PITO) Drs. Bob Widyahartono mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 29 September 1991 bahwa: (1) masyarakat Indonesia belum mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai kebersihan lingkungan, karena sebagian besar penduduk masih lebih banyak dihadapkan pada masalah upaya peningkatan taraf hidup; (2) para industrialis tidak pantas memanfaatkan situasi sekarang ini untuk terus melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup; (3) ASEAN bekerjasama dengan *US Business Council* akan menyelenggarakan serangkaian seminar lingkungan hidup di berbagai negara anggota ASEAN, dan Jakarta akan mendapatkan kesempatan pada tanggal 5 Nopember 1991; (4) para industrialis sebaiknya untuk tidak mencemari lingkungan, meskipun pengadaan kebutuhan teknologinya masih dianggap sebagai beban biaya; (5) pengenaan sanksi terhadap perusak lingkungan tidak dapat diharapkan berjalan mulus karena berbagai instansi di Indonesia belum sepakat mengenai pencegahan kerusakan lingkungan hidup; (6) jika satu instansi menekankan agar pencegahan perusakan lingkungan hidup diperketat, instansi lain tidak menanggapi dengan serius; (7) sudah waktunya bagi semua instansi bersepakat mencegah kerusakan lingkungan hidup, karena dunia telah banyak menyorot kerusakan lingkungan hidup di Indonesia (Kompas, 1-11-1991).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

1. Keinginan Vietnam menjadi anggota ASEAN

Keinginan Vietnam untuk menjadi anggota ASEAN telah dinyatakan lagi oleh Wakil Menlu Vietnam, Vu Khoan, yang mengikuti kunjungan PM Vietnam, Vo Van Kiet, ke Indonesia pada tanggal 24-27 Oktober 1991. Ia mengatakan bahwa Vietnam siap bekerja sama dengan negara-negara tetangganya, dan bersedia menandatangani *Declaration of ASEAN Concord and Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Kompas, 26-10-1991).

2. Reaksi dan Komentar

Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan di Singapura tanggal 29 Oktober 1991 bahwa: (1) pada prinsipnya Singapura tidak keberatan bila Vietnam menjadi anggota ASEAN. Kalau ekonomi Vietnam sudah berkembang setaraf dengan ekonomi negara-negara ASEAN, dan kebijaksanaan politiknya sudah

sejalan dengan apa yang selama ini berlaku dan diterapkan oleh ASEAN, maka tidak ada alasan untuk tidak menerima Vietnam menjadi anggota ASEAN. Tetapi ini tidak berarti bahwa keanggotaan Vietnam dalam ASEAN akan diterima dalam waktu dekat. Paling tidak dibutuhkan waktu lebih dari 3 tahun bagi Vietnam untuk menata ekonomi dalam negerinya; (2) penandatanganan Persefujuan Paris tentang Kamboja tanggal 23 Oktober 1991 akan dapat memperbaiki dan meningkatkan hubungan Vietnam dengan negara-negara di Asia Tenggara (*Kompas*, 31-10-1991).

Direktur Eksekutif CSIS Jakarta, Dr. Hadi Soesastro, mengatakan di Jakarta tanggal 9 November 1991 bahwa: (1) ASEAN secara resmi perlu segera menanggapi keinginan Vietnam untuk bergabung dalam ASEAN. Bila tidak dikhawatirkan Vietnam akan merasa kehadirannya kurang diterima oleh keenam negara anggota ASEAN; (2) meskipun beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menyambut baik keinginan itu, namun ASEAN perlu menanggapi secara resmi; (3) pada saat sekarang ini, secara politik tidak mungkin membiarkan Vietnam dan negara-negara Indochina lainnya berada di luar. Namun secara ekonomi, kalau tidak diadakan pengaturan-pengaturan, dikhawatirkan masuknya Vietnam dalam ASEAN akan menghambat prospek pendalaman kerja sama ekonomi ASEAN, yang akan diarahkan menuju kawasan perdagangan bebas (*ASEAN Free Trade Area-AFTA*); (4) ada tiga alternatif yang mungkin ditempuh ASEAN, yaitu: (a) langsung menerima Vietnam sebagai anggota ASEAN, sama seperti saat ASEAN menerima Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN. Hal ini berarti, Vietnam diterima sebagai negara penandatanganan Deklarasi Bangkok 1967, dengan taruhan mengorbankan pendalaman kerja sama ekonomi ASEAN. Dengan kata lain ASEAN mengorbankan pendalaman kerja sama ekonomi demi memperluas keanggotaan ASEAN; (b) membentuk suatu forum baru yang baru sama sekali, yaitu Forum Asia Tenggara, di mana Vietnam dan negara-negara Indochina yang lain diikutsertakan. Negara-negara yang menjadi anggota Forum Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*). Jadi yang dijadikan basis dari Forum Asia Tenggara adalah penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara, walaupun isinya adalah kerja sama fungsional tentang ekonomi dan pembangunan. Sementara itu, ASEAN tetap berjalan terus. Dengan demikian Forum Asia Tenggara berjalan seiring dan bersama-sama dengan ASEAN; (c) sama seperti alternatif pertama, yaitu Vietnam menandatangani Deklarasi Bangkok 1967. Namun dalam tahap awal Vietnam tidak termasuk dalam AFTA yang akan diberlakukan

di enam anggota ASEAN terdahulu. Bagi ASEAN tidak mungkin untuk mengajak Vietnam dalam AFTA sejak awal, karena negara itu baru saja meninggalkan sistem perencanaan ekonomi terpadu, dan belum mengenal sistem ekonomi pasar seperti yang selama ini dianut ASEAN; (5) wadah kerja sama antar negara Asia Tenggara tetap satu, yaitu ASEAN, tetapi hanya sebagian dari anggota ASEAN yang membentuk AFTA. Apabila Vietnam sudah dapat ikut serta, maka tinggal bergabung dalam AFTA, yang hanya merupakan sebagian dari kegiatan kerja sama antar negara ASEAN; (6) apabila alternatif ketiga yang dipilih, maka banyak masalah kerja sama ASEAN akan dapat diselesaikan, seperti dualisme dalam kepemimpinan ASEAN atau persaingan antara Menlu dan Menteri Ekonomi ASEAN dapat dihindari. Dengan demikian, ASEAN yang besar itu adalah lahannya Menlu, sedangkan AFTA adalah lahannya Menteri Ekonomi; (7) ia lebih condong kepada alternatif ketiga, karena tidak mengecilkan arti kehadiran Vietnam, dan sekaligus tidak merugikan pendalaman kerja sama ekonomi ASEAN; (8) apabila yang dipilih adalah alternatif kedua, seakan-akan menunjukkan bahwa ASEAN tidak *very welcome*, sehingga akan memperlemah posisi ASEAN (*Kompas*, 12-11-1991).

B. HUBUNGAN ASEAN - ASIA-PASIFIK

- Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik

Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) III berlangsung di Seoul, Korea Selatan, tanggal 12-14 November 1991, dihadiri oleh 26 Menteri yang mewakili 15 negara dari ASEAN, AS, Kanada, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, Australia, Cina, Hongkong dan Taiwan untuk membahas masalah liberalisasi perdagangan (*trade liberation*), Putaran Uruguay, dan masalah keanggotaan baru dalam APEC.

Presiden Korea Selatan, Roh Tae-Woo, mengatakan pada pembukaan sidang bahwa: (1) sudah tiba saatnya bagi APEC untuk membentuk suatu dasar institusional guna mempromosikan perdagangan intra-regional dan kerja sama ekonomi; (2) ia menghimbau pada kelima belas negara yang hadir pada APEC III untuk mempelajari kemungkinan terbentuknya suatu "area perdagangan bebas" yang mencakup seluruh kawasan Asia-Pasifik; (3) ia memberikan empat saran atas perkembangan prinsip dan arah yang harus dicapai APEC, yaitu: (a) APEC harus turut membentuk ekonomi dunia di abad 21 ke dalam suatu ekonomi global dengan memberi contoh melalui regionalisme terbuka di bawah prinsip-prinsip perdagangan bebas. APEC tidak boleh menjadi suatu blok perdagangan.

APEC harus mengembangkan suatu hubungan kerja sama dengan kawasan lainnya agar dapat mencegah terjadinya regionalisme yang *inward-looking*; (b) APEC harus memainkan peran aktif sebagai badan kerja sama regional yang mengikutsertakan ASEAN dan NAFTA; (c) APEC agar berusaha dapat menutup jurang antara negara ekonomi maju dan terbelakang. Negara yang ekonominya maju harus memberikan fasilitas akses pasaran pada negara-negara yang sedang berkembang, juga bagi negara-negara yang sedang menstransformasikan ekonominya; (d) di masa mendatang kawasan Asia-Pasifik agar menjadi suatu daerah perdagangan bebas (*Kompas*, 13-11-1991).

Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) APEC telah melampaui tahap penjajakan awal, yang dimulai pada pertemuan APEC I di Canberra November 1989 dan dikonkretkan pada pertemuan APEC II di Singapura Juli 1990; (2) ASEAN tidak menginginkan APEC terlalu cepat dilembagakan; (3) APEC diadakan pada saat putaran Uruguay menghadapi masalah kritis, sebab tahun 1991 ini putaran tersebut harus selesai; (4) ASEAN tidak mau tenggelam dalam APEC; (5) kawasan Asia-Pasifik masih memperlihatkan rasa kepentingan bersama yang terbatas. Kemajuan yang ada masih terbatas pada fungsi kerja sama bilateral, kerja sama antara kelompok sub-regional dan satu negara; (6) sebagai kelompok, APEC masih berada pada tahap-tahap awal mengembangkan kebiasaan-kebiasaan saling konsultasi, kerja sama satu sama lain, dan saling mengenal. Proses yang juga dialami pada sepuluh tahun pertama ASEAN; (7) kawasan Asia-Pasifik jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan ASEAN. Di sana juga terdapat sumber-sumber konflik, permusuhan, dan persaingan. Kawasan ini diwarnai oleh banyak perbedaan, tidak saja dalam kebudayaan tetapi juga dalam kecepatan perkembangan ekonomi. Sehingga kepentingan masing-masing pun akan berbeda; (8) diperlukan kesabaran, keteguhan dan visi yang jelas bagi APEC; (9) meskipun untuk mencapai daerah perdagangan bebas memerlukan waktu yang cukup lama, namun pasaran yang lebih terbuka dan lebih bebas akan dapat dicapai di Asia-Pasifik (*Kompas*, 14-12-1991); (10) pada akhir tahun 1991 Putaran Uruguay mendekati tahap kritis. ASEAN menerima APEC sebagai kendaraan untuk kerja sama yang lebih luas demi mempertahankan kemajuan (*Kompas*, 15-11-1991).

Menteri Perdagangan, Arifin Siregar, mengatakan bahwa: (1) saling ketergantungan di antara negara-negara ASEAN masih sangat rendah dan semua negara yang bersangkutan harus menyetujui suatu kerangka kerja GATT; (2) ketidakhadiran Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Malaysia dalam pertemuan itu, menandakan bahwa Malaysia merasa

tersinggung atas sikap AS yang tidak setuju pada konsep Kaukus Ekonomi Asia Timur (EAEC). Malaysia tersinggung atas surat Menlu James Baker yang dikirimkan kepada Jepang, yang menyarankan agar Jepang tidak perlu berpartisipasi dalam EAEC. Sebagai akibatnya, pada tanggal 10 November 1991, Menlu Jepang, Michio Watanabe, menyatakan bahwa Jepang tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan yang tidak mengikutsertakan AS; (3) Indonesia dapat memahami posisi Malaysia sebab Malaysia melihat kepentingan-kepentingan AS, Kanada dan negara-negara lainnya sangat bertentangan dengan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu Malaysia menyarankan suatu kerja sama ekstra (*extra cooperation*), bukan kerja sama intra (*intra cooperation*); (4) EAEC bukan suatu prioritas utama dalam agenda pertemuan APEC di Seoul ini, melainkan arah APEC di masa mendatang; (5) kerja sama perdagangan intra ASEAN masih sangat terbelakang. Kita tidak bisa begitu saja membuka pasaran kita pada dunia luar kalau negara-negara lainnya juga tidak ikut membuka pasaran mereka; (6) perbedaan di antara negara-negara ASEAN dalam kemajuan ekonomi akan menentukan sikap negara tersebut pada APEC dan liberalisasi perdagangan, misalnya Singapura, dengan sendirinya akan cenderung untuk memilih negara-negara APEC yang maju seperti AS dan Jepang. Sementara itu banyak negara di Asia-Pasifik yang masih belum menurunkan tarif, seperti Korea dan Jepang dalam beberapa sektor pertaniannya (*Kompas*, 14-11-1991); (7) kemajuan APEC III ini dapat dilihat dari tujuh proyek, yakni data perdagangan dan investasi, promosi perdagangan, pengembangan investasi dan alih teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kerja sama energi, usaha bersama memelihara sumber daya laut, serta proyek kerja sama telekomunikasi yang selesai dibahas dan tiga lagi yakni perikanan, transportasi dan turisme yang akan dimulai (*Kompas*, 15-11-1991).

Pada jumpa pers se usai sidang, Menlu AS, James Baker, mengatakan bahwa AS tidak setuju dengan pembentukan sub-group (EAEC) yang akan melembahkan APEC. Tetapi seandainya sub-group tersebut menguatkan APEC seperti NAFTA (*North American Free Trade Area*) yang konsisten dengan GATT maka masalahnya akan menjadi lain. Suatu badan konsultatif yang sengaja menarik garis dan membagi Pasifik bukan merupakan suatu badan yang mendukung adanya kerja sama.

Pendapat Menlu James Baker itu ditentang oleh Wakil Menteri Kehakiman Malaysia, Syed Hamid bin Syed Jaafar Albar, yang mengatakan bahwa EAEC bukan merupakan suatu forum kebijakan dan EAEC tidak inkonsisten dengan GATT dan APEC. EAEC hanya merupakan forum dialog.

Sidang APEC III menghasilkan Deklarasi Seoul, dan Deklarasi Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang didukung pernyataan bersama oleh 26 menteri dari 15 negara.

Isi Deklarasi Seoul yang sebenarnya telah disetujui pada tanggal 29 Agustus 1991 itu menyetujui perlunya konsolidasi, namun semua anggota tidak menghendaki konsolidasi yang berarti pelembagaan. Deklarasi ini tidak mengikat para partisipan secara hukum dan tidak akan ditandatangani oleh 15 negara anggotanya, tetapi merupakan suatu *gentlemen's agreement* (kesepakatan tak tertulis). Deklarasi yang tidak ditandatangani merupakan konsensus yang dapat diterima semua partisipan, baik yang menginginkan pelembagaan atau tidak. Deklarasi itu berisi tujuh butir, yaitu: (1) APEC bertujuan mempertahankan pertumbuhan serta pembangunan. Hal ini hanya akan dicapai melalui penguatan perdagangan terbuka multilateral dan penurunan hambatan perdagangan yang menghalangi arus perdagangan; (2) perlunya memberikan ruang lingkup kegiatan APEC. Ditekankan yang menjadi landasan kegiatan adalah kepentingan bersama yang akan menghasilkan keuntungan bagi semua, yang mencakup pertukaran informasi, konsultasi kebijakan, dan pengembangan strategi untuk mengurangi hambatan-hambatan; (3) para anggota APEC perlu saling memahami kepentingan serta kebijakan para partisipan lainnya. Untuk ini akan dikembangkan program kerja sama ekonomi; (4) cara kerja APEC berdasarkan konsensus bersama melalui dialog terbuka. Ini memperhitungkan tahap-tahap perkembangan ekonomi yang berbeda dari para partisipan. Butir ini mengakui sumbangan sektor swasta; (5) syarat-syarat partisipan baru. Syarat utama adalah partisipan harus mempunyai hubungan ekonomi yang kuat dengan kawasan Asia-Pasifik. Keputusan untuk menerima anggota baru akan berdasarkan konsensus; (6) masalah organisasi APEC. Ditetapkan pertemuan tahunan menteri untuk menentukan arah dan sifat APEC. Negara yang menjadi tuan rumah akan menjadi pimpinan pertemuan itu juga. Program kerja yang ditentukan pada rapat menteri merupakan tanggung jawab para pejabat tinggi yang akan dibahas pada SOM; (7) masa depan APEC, yang menekankan fleksibilitas (*Kompas*, 15-11-1991).

Deklarasi Putaran Uruguay berisi: (1) APEC III membicarakan prioritas pertama agenda APEC, yakni status Putaran Uruguay dari perundingan perdagangan multilateral; (2) masalah Putaran Uruguay merupakan masalah ekonomi yang kritis yang sedang dihadapi oleh masyarakat internasional; (3) pentingnya suatu sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan kuat; (4) penyelesaian Putaran Uruguay penting bagi pertumbuhan perdagangan dunia, memperlambat tekanan-tekanan proteksionisme, menanam kepercayaan

di dalam pasaran dan untuk mendukung kesinambungan reformasi ekonomi; (5) APEC menyambut tanda-tanda perkembangan di daerah-daerah penting dari negosiasi dan meminta agar kemajuan di bidang pertanian, tekstil dan sepatu, pelayanan, akses pasaran, pembuatan peraturan dan hak milik intelektual diteruskan; (6) suatu Putaran Uruguay yang sukses harus mengikutsertakan liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) barang-barang dan pelayanan; (7) mengambil keputusan politis agar Putaran Uruguay akhir tahun 1991 berhasil (*Kompas*, 15-11-1991).

Dalam seminar dengan judul "Tantangan Bagi Kerja Sama Ekonomi Pasifik" yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) di Jakarta, tanggal 8 November 1991, Dr. Andrew Elek mengatakan bahwa: (1) banyak tantangan bagi pembentukan APEC, sementara perbedaan besar terjadi pada kondisi ekonomi masing-masing negara peserta akan membatasi efektivitas APEC pada tahun-tahun awal; (2) perkembangan dan perubahan perekonomian dunia saat ini merupakan momentum yang tepat untuk lebih mengefektifkan fungsi APEC baik melalui institusionalisasi maupun pembentukan struktur yang lebih nyata; (3) proses menuju institusionalisasi perlu dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan pembenahan struktur APEC itu sendiri; (4) berbagai liberalisasi kini terjadi di berbagai negara anggota APEC, yang menyebabkan kawasan ini semakin terintegrasi dengan sistem perekonomian dunia; (5) meskipun secara politis sulit, anggota APEC hendaknya meningkatkan konsultasi bilateral dan saling mempercayai untuk saling memberikan informasi guna lebih mengefektifkan APEC; (6) perlu adanya konsistensi kebijakan ekonomi di setiap negara dan dibarengi harmonisasi dalam berbagai ketentuan, seperti ekspor-impor dan kepabeanan; (7) model kerja sama ekonomi Eropa yang menuju pasar tunggal tidak sesuai dengan kondisi Asia-Pasifik; (8) perbedaan di antara anggota APEC sangat besar, misalnya tingkat kemakmuran yang sangat berbeda. Hal ini merupakan salah satu penghalang bagi dilakukannya kerja sama ekonomi di Asia-Pasifik; (9) *EFTA (European Free Trade Area)* yang merupakan forum konsultasi antara pejabat tinggi yang membicarakan masalah ekonomi yang aktual dapat dicontoh oleh APEC (*Suarā Pembinaan*, 9-11-1991).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- PERTEMUAN SNC

Pertemuan *Supreme National Council* (SNC) dan wakil-wakil kelima anggota tetap DK-PBB berlang-

sung di Pattaya, Muangthai tanggal 3-5 Desember 1991.

Presiden Khmer Merah, Khieu Samphan, mengatakan bahwa: (1) ia menginginkan pasukan PBB yang ada di Kamboja bukan hanya untuk keselamatan dirinya tetapi juga untuk menciptakan netralitas politik di negaranya; (2) PBB harus menciptakan suasana politik yang netral.

Utusan Ketua Bersama Konferensi Perdamaian Paris tentang Kamboja, Jean-David Levitte, mengatakan bahwa pertemuan SNC baru dapat dilaksanakan setelah pihak PBB mengatakan kepada Norodom Sihanouk agar proses perdamaian Kamboja segera kembali ke jalurnya dan SNC segera bekerja di Phnom Penh (*Kompas*, 4-12-1991).

Presiden Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (SNC), Norodom Sihanouk, mengatakan bahwa: (1) rencana untuk suatu koalisi antara pendukungnya dan pemerintah Negara Kamboja (SOC) dibatalkan; (2) ia hanya percaya 50 persen kepada PM SOC Hun Sen; (3) secara definitif rencana untuk membentuk peme-

rintahan koalisi sudah dibatalkan; (4) rencana pembentukan pemerintahan koalisi ini tidak hanya ditentang oleh kelompok gerilya lainnya (Khmer Merah dan KPNLF), tetapi juga dari negara-negara asing, misalnya RRC; (5) pihak Khmer Merah dan Son Sann telah memveto untuk membatalkan rencananya berkunjung ke Vietnam pertengahan bulan Desember 1991 ini, namun ia tetap akan pergi ke Vietnam pada awal tahun 1992; (6) sekretariat SNC akan mulai bekerja di Kamboja, dan beberapa pejabat misi pendahuluan dari PBB di Kamboja akan ditempatkan pada sekretariat ini. Dengan demikian keamanan Khmer Merah akan terjamin; (7) AS tidak mempunyai peranan untuk menentukan nasib Khmer Merah, dan ia menghimbau kepada AS untuk tidak mencampuri urusan Kamboja; (8) SNC tidak dapat menjadi satelit atau budak dari Kongres AS (*Kompas*, 6-12-1991).

Kecampat faksi Kamboja menyetujui langkah-langkah keamanan baru yang memungkinkan para pemimpin Khmer Merah kembali ke Phnom Penh untuk melanjutkan penerapan perjanjian perdamaian Kamboja, yang terganggu akibat serangan massa terhadap para pemimpin Khmer Merah pada tanggal 27 November 1991 (*Antara*, 4-12-1991).

